

# STUDI DAK KEPARIWISATAAN SEBAGAI POTENSI PENDANAAN *SUSTAINABLE TOURISM*

Joko Tri Haryanto

Email: [Djohar78@gmail.com](mailto:Djohar78@gmail.com)

*Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral  
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*

## Abstract

Tourism sector is considered to have a very important role in order to increasing the national income, as well as to leveraging people welfare on the local area. Unfortunately, tourism is also considered as one sector that have a very large environmental damage, associated with the development of a variety of basic infrastructure such as resorts, hotels and roads. Therefore, the trend of future tourism development is sustainable tourism. The problem is, sustainable tourism in various regions always bumping to the funding issue. Therefore, by using descriptive analysis of regulation, the potential of the Special Allocation Fund (DAK) more in-depth analysis as well drafted policy recommendations related to the preparation of DAK of Tourism as one of the sources of funding sustainable tourism in the region in the future.

Keywords: *Sustainable Tourism, Specific Allocation Fund (DAK) , Specific allocation Fund for Tourism*

## Abstrak

Sektor pariwisata selama ini dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan devisa nasional, sekaligus menyejahterakan masyarakat di daerah. Sayangnya, pariwisata juga dianggap sebagai salah satu sektor yang menyumbang kerusakan lingkungan yang sangat besar terkait dengan upaya pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti resort, hotel dan jalan. Karenanya, tren pengembangan pariwisata ke depan adalah pariwisata yang sadar lingkungan (*sustainable tourism*). Permasalahannya, *sustainable tourism* di berbagai daerah selalu terbentur kepada persoalan pendanaan. Karenanya, dengan menggunakan metode analisis deskriptif regulasi, potensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dianalisis lebih mendalam sekaligus disusun rekomendasi kebijakan terkait penyusunan DAK Kepariwisata sebagai salah satu sumber pendanaan *sustainable tourism* di daerah ke depannya.

Kata Kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK Kepariwisata

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Hamzah, 2013, disebutkan bahwa kegiatan pariwisata sudah ada sejak dimulainya peradaban manusia ketika manusia mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan motif tertentu. Ketika peradaban makin maju, pariwisata pun ikut berkembang secara signifikan, hingga saat ini pariwisata telah menjadi bagian dari suatu industri besar yang mampu menghasilkan nilai devisa bagi suatu Negara.

Masih berdasarkan Hamzah, 2013, UNWTO (*United Nation of World Tourism Organization*) bahkan memprediksikan ke depannya industri pariwisata akan menjadi suatu industri besar di dunia yang akan berkembang secara pesat. Hingga tahun 2030, tingkat kunjungan wisatawan tersebut diperkirakan akan mencapai angka 1,8 miliar dengan devisa mencapai US\$1,03 miliar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah serta pemerintah daerah. Menurut Goeldner (1999:7 dalam Hermawan, 2008:17) ada empat elemen pokok yang berkaitan dengan pariwisata yaitu: (1) wisatawan, (2) bisnis yang menyediakan barang dan jasa wisatawan, (3) pemerintah sebagai *host community and area*, (4) masyarakat setempat (*host community*). Inti dari kegiatan pariwisata pada dasarnya adalah interaksi sosial yang senantiasa melibatkan pemerintah, industri dan pariwisata.

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaatnya bagi rakyat banyak. Alasan kedua pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis, adanya kegiatan kepariwisataan akan menimbulkan hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata yang dimaksud (Yoeti, 1997;33-34 dalam Haryanto, 2012;13).

Berdasarkan studi BKF, 2014, dari tahun ke tahun, pariwisata berkembang sangat pesat di Indonesia baik dari sisi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Hingga tahun 2011 saja, sektor pariwisata sudah menjadi penyumbang terbesar ke-5 devisa negara dengan nilai sekitar US\$8,5 meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar US\$7,6. Khusus pada tahun 2009, meskipun jumlah wisatawan mancanegara relatif meningkat namun terjadi penurunan devisa yang diakibatkan penurunan pengeluaran wisman dan lamanya tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia.

Studi tersebut juga menunjukkan bahwa sektor pariwisata sebagai sektor yang produktif, memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Data WTTC (*World Travel and Tourism Council*) dampak langsung sektor perjalanan dan pariwisata terhadap tahun 2013 sebesar 3,1 persen dan diperkirakan akan meningkat sebesar 8,1 persen di tahun 2014. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kegiatan industri seperti perhotelan, agen perjalanan, jasa transportasi penerbangan termasuk industri restoran. Sedangkan total kontribusi terhadap PDB sebesar 9,2 persen pada tahun 2013.

Demikian halnya dengan dampak terhadap penyediaan tenaga kerja, data WTTC menunjukkan pada tahun 2013, sektor perjalanan dan pariwisata menghasilkan sekitar 3 juta pekerjaan secara langsung. Selain itu, sektor ini pun memberikan dampak bagi penerimaan negara/daerah dalam bentuk berbagai pungutan perpajakan/retribusi yang dikenakan. Dengan dampak ekonomi yang demikian besar, maka sektor pariwisata dapat dipertimbangkan menjadi sektor prioritas bagi pemerintah daerah yang perlu dikembangkan.

Studi Harun, 2008 dalam BKF, 2014 menyebutkan bahwa perjalanan wisata dunia di 2020 diprediksikan akan mencapai 1,6 miliar orang. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menarik wisatawan baik mancanegara (wisman) maupun nusantara (wisnus). Pada tahun 2002 misalnya, jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia sekitar 5 juta orang dengan menghasilkan devisa sekitar USD 4,3 miliar. Perolehan devisa juga meningkat pada tahun 2012 menjadi USD 9,1 miliar seiring dengan peningkatan jumlah wisman pada tahun 2012 sebanyak 8 juta orang.

Masih berdasarkan studi yang sama, disebutkan bahwa perkembangan jumlah wisnus juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2003, jumlah wisnus yang melakukan perjalanan wisata mencapai sekitar 36 juta orang, pada tahun 2012 meningkat menjadi sekitar 64 juta orang. Peningkatan jumlah wisnus tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan dari sisi pendapatan. Secara teoritis, tingginya pendapatan masyarakat pada suatu kondisi akan berdampak pada meningkatnya penggunaan waktu yang dihabiskan untuk bersantai (*leisure time*).

Dampak selanjutnya akan berimbas pada peningkatan permintaan terhadap jasa-jasa pariwisata. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan mengubah pola konsumsi masyarakat dengan memperbesar proporsi pengeluaran untuk nonmakanan, termasuk pengeluaran untuk berwisata. Dengan kata lain, meningkatnya kegiatan berwisata yang dilakukan masyarakat tentunya akan disertai dengan meningkatnya pengeluaran yang dibelanjakan.

Keseluruhan prestasi tersebut tentu tak lepas dari berbagai program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah terkait upaya memajukan sektor pariwisata. Tahun 2008 misalnya, pemerintah mencanangkan Program Visit Indonesia yang diharapkan mampu membawa semangat baru bagi penggiat pariwisata di Indonesia. Melalui upaya promosi peningkatan pelayanan dan membaiknya situasi keamanan, statistik kedatangan wisman ke Indonesia pada tahun 2008 telah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah wisman yang telah datang mencapai rekor tertinggi sebesar 6,23 juta orang. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2007 yang mencapai 5,51 juta orang, maka jumlah wisman yang datang mengalami peningkatan sebesar 13,24 persen (NESPARNAS, 2009 dalam Haryanto, 2012;2).

Meskipun memberikan benefit yang signifikan bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat, pariwisata juga dianggap sebagai salah satu sektor yang menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya melalui pembangunan berbagai infrastruktur yang terkadang justru harus merusak alam sebagaimana yang disebutkan dalam laporan World Tourism Organization tahun 1996. Banyak kasus di berbagai negara, pembangunan *resort* dan hotel untuk kepentingan pariwisata, justru harus menghancurkan pantai, laut, hutan dan berbagai ekosistem lainnya yang sudah ada dan tumbuh sebelumnya (Putra, 2006 dalam Haryanto, 2012;3).

Kondisi ini makin diperparah ketika dewasa ini terdapat kecenderungan perubahan minat dari wisatawan terhadap daerah tujuan wisatanya. Wisatawan relatif bosan jika disuguhkan berbagai atraksi yang bersifat *artificial* (buatan). Selera mereka saat ini justru bergerak ke arah jenis wisata yang lebih beragam, seperti wisata untuk menikmati produk atau kreasi budaya (*culture*) dan peninggalan sejarah (*heritage*), serta ekowisata (*nature*) (BKF, 2014).

Karenanya perlu dipikirkan adanya suatu konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) lintas generasi. WTO (*World Tourism Organization*) kemudian mendefinisikan pembangunan pariwisata berkelanjutan ini sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini, sambil melindungi dan mendorong kesempatan untuk waktu yang akan datang. Mengarah pada pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial dan estetika dapat terpenuhi sambil memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial, keanakeragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan.

Produk pariwisata berkelanjutan dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata. Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu panjang (Sharpley, 2000:10, Nurhidayati, 2008 dalam Haryanto, 2012).

Persoalan anggaran juga menjadi permasalahan lainnya. Penelitian Haryanto, 2012 menyebutkan bahwa di banyak lokasi wisata, ketiadaan anggaran akhirnya menyebabkan konservasi dan pemeliharaan lokasi wisata menjadi tidak optimal. Untuk itulah, konsep *self financing* ke depannya diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi ketiadaan anggaran ini. Konsep yang dikembangkan adalah wisatawan harus ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lokasi wisata demi terciptanya keberlanjutan antar generasi. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kereelaan membayar (*willingness to pay*) dari wisatawan untuk ikut berpartisipasi. Tingkat kerelaan membayar ini dapat diukur jika valuasi jasa lingkungan dalam kegiatan pariwisata tersebut betul-betul dapat diukur.

Pemerintah sebetulnya memiliki peran yang besar dalam mengatasi permasalahan ketiadaan anggaran ini melalui peran Pemda (Pemerintah Daerah), khususnya di era desentralisasi fiskal. Di era desentralisasi fiskal ini, Pemda memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan pembangunan daerahnya termasuk pengembangan sektor pariwisata, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam regulasi tersebut, urusan kebudayaan dan pariwisata menjadi urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkat pemerintahan. Artinya baik Pemerintah Pusat maupun Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) wajib melaksanakan kewenangan tersebut dalam batas-batas kewenangan masing-masing. Adapun pembagian urusan akan didasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas serta efisiensi dengan tetap memperhatikan keserasian hubungan antar tingkat pemerintahan.

Sesuai dengan asas *money follows function*, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga memberikan implikasi penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah baik melalui penyerahan basis perpajakannya maupun pengalokasian dalam bentuk Transfer ke Daerah. Di dalam komponen Transfer ke Daerah, mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) seringkali dijadikan mekanisme bagi percepatan pembangunan infrastruktur fisik di banyak daerah, dibandingkan komponen lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Memandang pentingnya analisis tersebut, dalam penelitian ini persoalan yang diangkat adalah ketiadaan anggaran dalam mendukung terciptanya *sustainable tourism* di daerah. Mekanisme DAK kemudian dianggap sebagai salah satu alternative solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan ini. Namun demikian, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam untuk memastikan terselenggaranya suatu kebijakan DAK Kepariwisata yang mendukung tujuan *sustainable tourism* di daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, beberapa pertanyaan penelitian yang disampaikan diantaranya:

- a) Bagaimana potret alokasi DAK dibandingkan alokasi DAU dan DBH?
- b) Bagaimana mekanisme pembentukan DAK Kepariwisata?

c) Bagaimana mekanisme pengalokasian DAK Kepariwisata terhadap daerah?

## TINJAUAN TEORETIS

### Pariwisata

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tak dapat dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh beberapa ahli mendefinisikan pariwisata sebagai berikut:

*“Tourism comprises the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourists, local and service personnel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions”* (Leiper, 1995, dalam Richardson & Flicker, 2004;6, dalam Pitana & Diarta, 2009;45 );

*“The activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”* (WTO dalam Richardson & Flicker, 2006;6, dalam Pitana & Diarta, 2009;45);

*“The sum of the phenomena and relationships arising from the interactions of tourist, business, host government and host communities in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors”* (McIntosh, 1980;8 dalam Pitana & Diarta , 2009;45);

*“Tourism is defined as the interrelated system that includes tourist and the associated services that are provided and utilised (facilities, attractions, transportation, and accomodation) to aid in their movement”* (Fennel, 1999;4, dalam Pitana & Diarta, 2009;45).

Definisi pariwisata memang tidak dapat persis sama di antara para ahli, hal yang memang jamak terjadi dalam dunia akademis, sebagaimana juga dapat ditemui pada berbagai disiplin ilmu lain. Meskipun ada variasi batasan, ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam batasan pariwisata yaitu adanya unsur travel, adanya unsur tinggal sementara di tempat yang bukan tempat tinggalnya serta tujuan utamanya bukan untuk mencari penghidupan di tempat yang dituju (Pitana & Diarta, 2009; 45-47).

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2010-2014, pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Masih dalam Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2010-2014, disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan memiliki peran penting di dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jatidiri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dan negara dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Menurut Yoeti (1999;34-35) dalam Haryanto;2012, wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, tidak kurang selama 24 jam, dan ia semata-mata sebagai konsumen, bukan mencari nafkah atau bekerja tetap ditempat yang ia kunjungi. Wisatawan itu adalah orang yang ingin memenuhi kebutuhan setelah kebutuhan-kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Kebutuhan itu antara lain seperti melihat obyek wisata, tata cara hidup masyarakat bangsa lain dan hasil kebudayaannya. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, maka dilakukan pengembangan di bidang kepariwisataan.

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan kata lain, pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaatnya bagi rakyat banyak. Alasan kedua pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat non ekonomis, adanya kegiatan kepariwisataan akan menimbulkan hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata yang dimaksud (Yoeti, 1997;33-34).

Menurut Charles R. Goeldner (1999:7 dalam Hermawan, 2008:17) ada empat elemen pokok yang berkaitan dengan pariwisata yaitu: (1) wisatawan, (2) bisnis yang menyediakan barang dan jasa wisatawan, (3) pemerintah sebagai host community and area, (4) masyarakat setempat (host community). Inti dari kegiatan pariwisata pada dasarnya adalah interaksi sosial yang senantiasa melibatkan pemerintah, industri dan pariwisata.

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia mengakui pariwisata merupakan industri yang mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian nasionalnya. Menurut Richter & Richter, hampir secara universal pemerintah di dunia menerima pariwisata sesuatu yang positif sehingga sebagian besar kebijakan pariwisata dibuat untuk memperluas industri pariwisata (Michael Hall, 2000:25 dalam Hermawan, 2008:17). Selanjutnya ia mengatakan lembaga pemerintah pada setiap tingkat mulai dari internasional sampai ke kota kecil secara berangsur-angsur berperan lebih aktif dalam penggunaan pariwisata sebagai alat pembangunan.

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, pariwisata sendiri memiliki banyak tujuan dan salah satunya adalah kebudayaan. Wisatawan secara umum bertujuan berlibur, memanfaatkan waktu untuk mendapat kesenangan. Itulah sebabnya bagi bangsa-bangsa yang suka berjemur dan berenang, daerah pantai yang indah merupakan daerah tujuan wisata yang populer. Kadang-kadang itu ditambah pula dengan peluang-peluang spa atau pijat yang khas, atau menata rambut jadi kepong kecil-kecil. Atraksi boga dan kesenian juga dapat menjadi nilai tambah bagi suatu daerah wisata. Namun eksekusi dari kebebasan berinteraksi antar tamu atau antara tamu dengan tuan rumah itu juga dapat menjuru ke arah pelacuran dan perdagangan narkoba.

Di samping pariwisata dengan tujuan umum, terdapat pula pariwisata minat khusus. Definisi khusus di sini adalah obyeknya apakah alam atau budaya. Dalam wisata minat khusus ini terdapat varian antara yang pasif dan aktif. Untuk yang pasif wisatawan terutama menerima sajian dalam arti menikmati suatu lingkungan alam yang

mengagumkan atau langka ataupun menyaksikan ekspresi-ekspresi budaya yang khas dan mungkin langka seperti upacara daur kosmik. Untuk yang aktif wisatawan melakukan suatu kegiatan yang terkait dengan obyeknya seperti arung jeram dalam hal wisata alam, atau dalam hal wisata budaya melakukan kegiatan pengalaman budaya seperti membatik, membuat anyaman, belajar menari dan lain-lain (Sedyawati, dalam Yoeti, 2006; 22). Secara garis besar penggolongan daya tarik wisata itu sendiri dapat dibedakan menjadi;

- a) Obyek wisata alam yang antara lain terdiri dari laut, pantai, gunung, danau, sungai, flora, fauna, kawasan lindung, cagar alam dan pemandangan alam;
- b) Obyek wisata budaya misalnya upacara kelahiran, tarian tradisional, musik tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, festival budaya dan museum;
- c) Obyek wisata buatan seperti sarana dan prasarana olah raga, permainan, ketangkasan, kegemaran, kebun binatang, taman rekreasi, taman nasional dan pusat perbelanjaan (Sammeng, 2000;27-28)

### **Pariwisata Berkelanjutan**

Pengertian pariwisata berkelanjutan adalah: keberlanjutan pariwisata terkait erat dengan kebutuhan wisata saat ini yang tidak boleh mengorbankan dan mengurangi hak dan kebutuhan generasi yang akan datang. Isu pelestarian sumber daya alam dan lingkungan terpampung di dalam kesepakatan bangsa-bangsa di dunia pada KTT Bumi yang diselenggarakan oleh UNCED (*United Nation Conference on Environment and Development*) yang lebih dikenal sebagai Rio Summit.

Berbagai kesepakatan dalam Rio Summit tahun 1992 dievaluasi dalam konferensi Johannesberg tahun 2002 yang mempertegas implementasi pembangunan berkelanjutan di segala bidang. KTT Bumi menghasilkan 5 (lima) butir kesepakatan yang erat kaitannya dengan konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang mencakup : Deklarasi Rio, Konservasi Perubahan Iklim, Konservasi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip Kehutanan dan Agenda 21. Prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran dari piagam tersebut adalah:

- a) Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat;
- b) Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia;
- c) Pemerintah dan otoritas yang kompeten dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dengan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan;
- d) Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung kepada proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan;
- e) Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Promosi atau dukungan

terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;

- f) Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan;
- g) Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

Selain itu dokumen tersebut menyiratkan bahwa membuat perubahan ke arah pariwisata yang berkelanjutan memerlukan perubahan orientasi cara kerja yang fundamental dari dua pihak yaitu : pemerintah dalam mengarahkan pembangunan pariwisata serta usaha perjalanan dan pariwisata dalam menjalankan usahanya.

Aronsson (2000:40 dalam Nurhidayati, 2008) mencoba menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang interpretasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu: 1) pembangunan pariwisata berkelanjutan harus mampu mengatasi permasalahan sampah lingkungan serta memiliki perspektif ekologis; 2) pembangunan pariwisata berkelanjutan menunjukkan keberpihakannya pada pembangunan berskala kecil dan yang berbasis masyarakat lokal atau setempat; 3) pembangunan pariwisata berkelanjutan menempatkan daerah tujuan wisata sebagai penerima manfaat dari pariwisata, untuk mencapainya tidak harus dengan mengeksploitasi daerah setempat; 4) pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan pada keberlanjutan budaya, dalam hal ini berkaitan dengan upaya-upaya membangun dan mempertahankan bangunan tradisional dan peninggalan budaya di daerah tujuan wisata.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau *Sustainable Tourism Development* menurut Yaman & Mohd (2004:584 dalam Nurhidayati, 2008)) ditandai dengan 4 (empat) kondisi yaitu : 1) anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata; 2) pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan; 3) kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung; 4) investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternatif.

Sedangkan indikator yang dikembangkan pemerintah tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan (Anonim, 2000) adalah: 1) kesadaran tentang tanggung-jawab terhadap lingkungan, bahwa strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menempatkan pariwisata sebagai *green industry* (industri yang ramah lingkungan), yang menjadi tanggung-jawab pemerintah, industri pariwisata, masyarakat dan wisatawan; 2) peningkatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata; 3) kemantapan atau keberdayaan industri pariwisata yaitu mampu menciptakan produk pariwisata yang dapat bersaing secara internasional, dan mensejahterakan masyarakat di tempat tujuan wisata; 4) kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang bertujuan menghapus atau meminimalisir perbedaan tingkat kesejahteraan wisatawan dan masyarakat di daerah tujuan wisata untuk menghindari konflik dan dominasi satu sama lain. Hal ini juga didukung dengan memberi perhatian atau pengembangan usaha skala kecil oleh masyarakat lokal (Teguh, 2008: 494-495).

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data

Studi pembentukan DAK Kepariwisata ini sebagian besar akan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari beberapa instansi pemerintah khususnya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Beberapa data pendukung lainnya akan didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Pariwisata. Secara lebih detail, kebutuhan data yang digunakan terdiri dari;

**Tabel 3.1. Jenis Data**

No	Data	Instansi
1	Data Realisasi DAK per Provinsi	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
2	Data Formulasi DAK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
3	Potret APBD Sektor Pariwisata	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
4	Data Realisasi Transfer ke Daerah	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sumber: peneliti, data diolah

Berdasarkan analisis data tersebut, nantinya akan digunakan sebagai input dalam melakukan analisis kelayakan DAK sebagai salah satu instrumen pendanaan pariwisata di daerah dalam mendukung tujuan terciptanya *sustainable tourism*.

### Jenis Penelitian dan Metode Analisis

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis berbagai data sekunder yang nantinya akan menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan. Selain itu juga akan dilakukan analisis terhadap kebijakan di dalam regulasi terkait formulasi DAK.

Untuk mendukung hasil pembahasan, studi ini juga akan menggunakan data-data kuantitatif dalam bentuk statistika deskriptif untuk menggambarkan potensi dan feasibilitas DAK sebagai instrumen pendanaan *sustainable tourism* di daerah. Instrumen analisis yang digunakan sebagian besar berupa tabel, gambar-gambar dan grafik untuk memberikan pemahaman di dalam analisis yang dilakukan hingga mendapatkan dasar rekomendasi bagi pemerintah. Metode analisis juga menggunakan perbandingan kelemahan dan keunggulan dari masing-masing mekanisme sumber-sumber pendanaan yang ada di daerah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

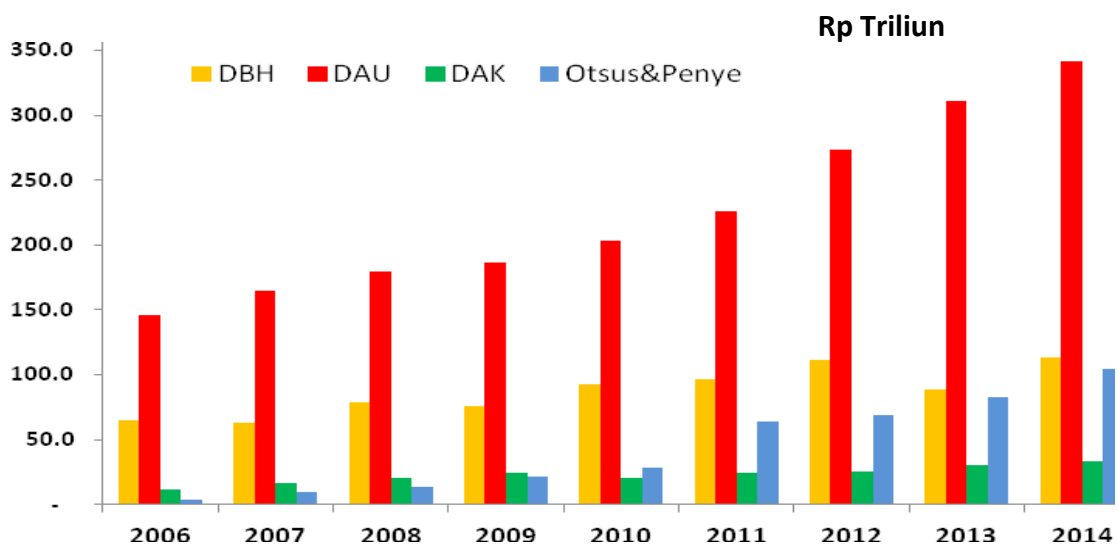
### Potret DAK Di Era Desentralisasi Fiskal

Dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mekanisme sistem hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dalam bingkai kebijakan Transfer ke Daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah ini sendiri dilatarbelakangi oleh beragamnya kondisi keuangan di masing-masing daerah.

Ada beberapa daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, sementara beberapa daerah lainnya memiliki kekayaan basis pajak yang dapat

dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, di hampir banyak daerah lainnya justru tidak memiliki kekayaan SDA maupun basis pajak yang memadai. Untuk itulah pemerintah kemudian mengalokasikan Transfer ke Daerah dengan tujuan mengurangi *vertical imbalances* diantara Pemerintah Daerah melalui kebijakan DAU dan DAK, serta kebijakan DBH untuk mengurangi *horizontal imbalances* antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Transfer ke Daerah sendiri terdiri dari komponen Dana Perimbangan (Daper) serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Penyesuaian. Daper sendiri terdiri dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) dan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Secara umum besaran alokasi Transfer ke Daerah ini terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya seperti dalam grafik berikut;



Sumber: DJPK, Kemenkeu  
Grafik 4.1. Realisasi Transfer ke Daerah

Berdasarkan grafik 4.1. dapat dilihat meskipun alokasi DAU sangat mendominasi dalam setiap tahunnya serta menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2006 hingga 2014, namun peran dari DAK juga cukup signifikan. Alokasinya juga cenderung terus meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Bahkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah 2015, ke depannya seluruh anggaran pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah, akan diwujudkan dalam bentuk DAK.

Hal ini tentu tak lepas dari filosofi DAK yang spesifik bersifat fisik serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Mekanisme pengalokasikan DAK pun menggunakan metode kinerja triwulan, dimana kinerja fisik menjadi salah satu kriteria utama selain tertib administrasi. Ini yang sedikit membedakan dengan alokasi DAU serta DBH yang cenderung bersifat *block grant* dengan kewenangan belanja ada di tangan Pemda sepenuhnya.

Kondisi ini jelas menjadi dasar regulasi yang positif bagi pemanfaatan DAK nantinya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata khususnya *sustainable tourism* di daerah. Dibandingkan DAU maupun DBH, pemerintah lebih memprioritaskan DAK dalam mendukung berbagai percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.

Hingga tahun 2014, terdapat 19 bidang yang sudah mendapatkan alokasi DAK seperti Tabel di bawah. Dari alokasi tersebut, bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan selalu mendapatkan alokasi terbesar setiap tahunnya. Tahun 2008 misalnya, bidang pendidikan mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp7,0 triliun, meningkat menjadi Rp9,3 triliun di tahun 2010 serta Rp10,0 triliun di tahun 2014.

**Tabel . Alokasi DAK Per Bidang Tahun 2008-2014**

No	Bidang	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendidikan	7,0	9,3	9,3	10	10	11	10
2	Kesehatan	3,8	4	2,8	3	3	3,1	3,1
3	Infrastruktur Jln	4	4,5	2,8	3,9	4	4	6,1
4	Infrastruktur irigasi	1,4	1,5	0,9	1,3	1,3	1,3	2,2
5	Prasarana Pemerintahan Daerah	0,3	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Kelautan & Perikanan	1,1	1,1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,8
7	Infrastruktur Air Minum	1,4	1,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,8
8	Pertanian	0,3	0,3	1,5	1,8	1,8	1,8	2,5
9	Lingkungan Hidup	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5
10	Keluarga Berencana	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	2,5	0,4
11	Kehutanan	0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5
12	Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7
13	Sarana Perdagangan	0	0	0,1	0,3	0,3	0,6	0,7
14	Infrastruktur Sanitasi	0	0	0,3	0,4	0,4	0,5	0,8
15	Energi Perdesaan	0	0	0	0,1	0,1	0,4	0,4
16	Perumahan dan Permukiman	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,2
17	Keselamatan Transportasi Darat	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,2
18	Transportasi Perdesaan	0	0	0	0,1	0,1	0,2	0,3
19	Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	0	0	0	0,1	0,1	0,4	0,4

Sumber: DJPK, Kemenkeu

Alokasi DAK yang besar untuk bidang pendidikan tersebut tidak lepas dari amanat UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen APBN dan APBD dialokasikan untuk bidang pendidikan. Bidang lainnya yang juga mendapatkan alokasi DAK cukup signifikan adalah bidang kesehatan dimana tahun 2008 aloksinya mencapai Rp3,8 triliun, meningkat menjadi Rp4,0 triliun di tahun 2009 serta stabil di kisaran Rp3,1 triliun dalam 2 tahun terakhir (2013-2014).

Besarnya alokasi bidang kesehatan menunjukkan komitmen nyata dari pemerintah terkait upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya khususnya dalam upaya menciptakan generasi bangsa yang sehat dan kompetitif. Besarnya alokasi bidang kesehatan juga diharapkan mampu mendukung berbagai program jaminan kesehatan nasional yang bersifat *national coverage*.

Bidang lainnya yang memiliki alokasi signifikan lainnya adalah bidang infrastruktur jalan. Jika tahun 2008, alokasinya masih berkisar Rp4 triliun maka di tahun 2009 alokasinya sudah meningkat menjadi Rp4,9 triliun serta Rp6,1 triliun di tahun 2014. Peningkatan alokasi tersebut sudah selaras dengan komitmen pemerintah untuk

mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya perhubungan dalam mendukung terciptanya *national connectivity*.

Jika dilihat dari pergerakan jumlah bidang yang mendapat alokasi DAK, hingga tahun 2009 sebetulnya hanya sekitar 11 bidang. Namun demikian, dengan alasan kepentingan serta prioritas nasional maka jumlah bidang yang mendapatkan alokasi meningkat hingga 19 bidang di tahun 2014. Memandang pentingnya sektor pariwisata khususnya dalam mendukung *sustainable tourism* di daerah, sekiranya dianggap masih ada peluang bagi perluasan DAK Kepariwisata ke depannya, meskipun hal ini sebetulnya sangat bergantung kepada inisiatif dari Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait dalam hal ini Kementerian Pariwisata.

### **Mekanisme Pembentukan DAK Kepariwisata**

DAK ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun program yang menjadi prioritas nasional tersebut harus dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam tahun anggaran bersangkutan. Jika sektor pariwisata hendak dijadikan salah satu bidang perluasan yang akan diusulkan untuk dapat di danai dengan DAK, maka persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah adanya penjelasan dalam RKP terkait pentingnya pengelolaan sektor pariwisata bagi peningkatan kapasitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Berdasarkan arahan dalam RKP tersebut, Menteri teknis dalam hal ini Menteri Pariwisata akan mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Menteri Pariwisata menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

Secara umum, nantinya beberapa pihak teknis yang terkait dalam penyusunan DAK Kepariwisata diantaranya: Kementerian Keuangan, Bappenas serta Kementerian Pariwisata. Penyusunan DAK nasional sendiri ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan kemudian melakukan penghitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan (b) Karakteristik daerah.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh Menteri Pariwisata.

### **Mekanisme Pengalokasian DAK Kepariwisata ke Daerah**

#### **Langkah I: Penentuan Daerah Penerima DAK Kepariwisata Berdasarkan Kriteria Umum**

Berdasarkan data Indeks Fiskal Nasional (IFN), maka ditentukanlah daerah-daerah penerima DAK Kepariwisata yaitu daerah-daerah dengan nilai  $IFN < 1$ . Daerah dengan  $IFN < 1$  artinya daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah di bawah rata-rata kemampuan keuangan daerah secara nasional. Satu hal yang perlu diingat bahwasanya data yang nantinya digunakan dalam perhitungan adalah data realisasi yang telah dilakukan audit oleh BPK, baik yang sudah di-perdakan dalam Perda pertanggungjawaban maupun belum.

#### **Langkah II: Penentuan Daerah Penerima DAK Kepariwisata Berdasarkan Kriteria Khusus**

Bagi daerah yang tidak layak secara kapasitas fiskal, masih memiliki peluang untuk mendapatkan DAK Kepariwisata, apabila memenuhi Kriteria Khusus sebagai berikut:

- a) Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat: berdasarkan Undang-undang yang mengatur Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, disebutkan bahwa daerah Kab/Kota di wilayah ini diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK. Kondisi ini jelas menjadi pendukung yang sangat penting bagi pendanaan berbagai wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang masuk dalam koridor pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang meliputi DPN Sorong-Raja Ampat dan sekitarnya, DPN Manokwari-Fak-Fak dan sekitarnya, DPN Biak-Numfor dan sekitarnya serta DPN Sentasi-Wamena dan sekitarnya.
- b) Karakteristik daerah: karakteristik daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DAK biasanya disesuaikan dengan arahan Presiden serta RKP tahun berjalan. Untuk tahun 2015, arahan Presiden serta RKP menitikberatkan kepada Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan serta Daerah Pesisir Kepulauan. Jika ingin mendapatkan alokasi dengan mendasarkan karakteristik daerah, maka ke depannya kriteria daerah DPN dapat dijadikan dasar pengalokasian. Untuk saat ini, kriteria Daerah Pesisir dan Kepulauan sekiranya mendukung kriteria DPN ke depannya. Dari nilai masing-masing karakteristik daerah, kemudian akan dilakukan penghitungan indeks masing-masing karakteristik. Setelah itu masing-masing indeks akan digabungkan menjadi Indeks Karakteristik Wilayah (IKW). Untuk menentukan daerah penerima DAK, IKW akan digabung secara komposit dengan Indeks Fiskal Nasional (IFN) dengan porsi 50%: 50% menjadi Indeks Fiskal Wilayah (IFW). Daerah yang dinyatakan layak mendapatkan alokasi DAK adalah daerah dengan  $IFW > 1$ .

#### **Langkah III: Penentuan Daerah Penerima DAK Kepariwisata Berdasarkan Kriteria Teknis**

Bagi daerah-daerah lainnya yang telah layak dinyatakan secara fiskal, otsus Papua/Papua Barat, dan kewilayahan kecuali yang telah dikeluarkan karena  $IFN$  tinggi,

beberapa daerah masih dimungkinkan mendapatkan alokasi, apabila Indeks Teknis (IT) sangat tinggi. IT yang sangat tinggi ini diperlukan untuk menghitung IFWT sebagai indeks komposit gabungan antara IFW dan IT dengan porsi 50%:50%. Daerah yang layak menerima DAK adalah daerah dengan nilai IFWT>1.

Peran dari Kementerian Pariwisata kemudian menjadi sangat signifikan dalam hal mengusulkan berbagai kriteria yang masuk dalam kategori Kriteria Teknis. Untuk bidang pendidikan misalnya kriteria teknis yang diajukan merupakan gabungan antara kriteria yang langsung berkaitan dengan bangunan fisik seperti rehabilitasi ruang kelas rusak, ruang guru, ruang kepala sekolah serta beberapa indikator yang bersifat *software* seperti Angka Partisipasi Murni (APM). Ke depannya hal-hal seperti inilah yang seharusnya diajukan oleh Kementerian Pariwisata terkait penyusunan Kriteria Teknis untuk mengalokasikan DAK Kepariwisata.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

- a) Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan nasional sekaligus menyejahterakan masyarakat di daerah;
- b) Sayangnya, pariwisata juga dianggap sebagai salah satu sektor yang menyumbang kerusakan lingkungan yang sangat besar terkait dengan upaya pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti *resort*, hotel dan jalan;
- c) Karenanya, tren pengembangan pariwisata ke depan adalah pariwisata yang sadar lingkungan (*sustainable tourism*);
- d) Permasalahannya, *sustainable tourism* di berbagai daerah selalu terbentur kepada persoalan pendanaan;
- e) Berdasarkan analisis, mekanisme transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia;
- f) Mekanisme DAK dapat digunakan sebagai mekanisme insentif dan reward kepada daerah untuk menciptakan *sustainable tourism*. Namun demikian tujuan tersebut dapat diwujudkan jika terjadi sinergi yang sangat erat antar berbagai Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait sesuai dengan peran dan tugas masing-masing ;

### Saran

- a) Rekomendasi bagi Pemerintah Pusat : membuka agenda perluasan DAK Kepariwisata sebagai salah satu agenda prioritas nasional ;
- b) Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah: memasukkan agenda *sustainable tourism* ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- c) Rekomendasi bagi Perguruan Tinggi: melakukan *exercise* terkait kebijakan pengembangan *sustainable tourism*;

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahl, Roy W. (1999) *"Fiscal decentralization as developmental policy"* Public Budgeting & Finance Vol 19.
- Bahl, Roy W. And J. Linn (1994) *"Fiscal decentralization and intergovernmental transfers in less developed countries"* Published: The Journal of Federalism Vol 24 Winter.
- Bahl, Roy W. And J. Linn (1992) *"Urban Public Finance in Developing Countries New York: Oxford University Press"*
- Bahl, Roy W. And S. Nath (1986) *"Public expenditure decentralization in developing countries"* Environment and Planning C: Government and Policy Vol 4
- Oates, Wallace (1999) *"An Essay on Fiscal Federalism"* Journal of Economic Literature Vol 37
- Oates, Wallace (1985) *"Searching for Leviathan: An Empirical Study"* The American Economic Review Vol 75 No 4
- Prud'homme, Remy (1990) *"Decentralization of Expenditure or Taxes: The Case of France" Decentralization, Local Governments, and markets ed Bennett Oxford: Claredon Press*
- Shadbegian, Ronald J. (1999) *"Fiscal federalism, collusion, and government size: Evidence from the States"* Public Finance Review vol 27
- Sidik, Machfud, *"Prinsip dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara"* dalam Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Ditjen PKPD Jakarta 2004.
- Akai, N., and Sakata M., 2002, Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross Section Data for the United States, Journal of Urban Economics, LII:93-108.
- Ani, Ni Luh Nana Putri, dan Dwirandra, A.A.N.B., 2014, Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3:481-497, ISSN: 2302-8556.

- Aziz Abdul, Analisis Kausalitas Pengeluaran Pemerintah Pada APBN dan Kinerja Sektor Pariwisata Di Indonesia Serta Dampak Ekonomi Turunannya, Jurnal Kepariwisata Indonesia, Vol. 6. No. 4, Desember 2011.
- Halim, A., 2001, Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lundberg, Donald E, Stavenga, Mink H dan M. Krishnamoorthy, Ekonomi Pariwisata, PT Gramedia, Jakarta: 1997 (terjemahan); Monkam Nara, 2012, "Fiscal Decentralization and Local Taxation," presentasi Training on Fiscal Decentralization and Local Taxation, African Tax Institute, University of Pretoria, South Africa.
- Rondinelli, DA and Cheema G Shabbir, 1983, "Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experiences," World Bank Staff Working Papers, Spillane, James J, Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta: 1987
- Widiastuti, Ni Komang, 2013, Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Volume 2 No. 5 Tahun 2013, ISSN Online : 2337-3067.
- Renstra 2012-2014 Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata yang diterbitkan tahun 2012 United Nation World Tourism Organization (UNWTO) (<http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary>) diakses Juli 2014
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah
- ..... ,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- ..... ,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- ..... ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- .....Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah